



Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Nagari Balimbing

Vicy Andriany¹, Tezi Asmadia², Eka Kharisma³

IAIN Batusangkar¹²³

vicyandriany@iainbatusangkar.ac.id¹, teziasmadia@iainbatusangkar.ac.id²,

ekakharisma6@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the role of the Family Hope Program in poverty alleviation in Nagari Balimbing. The problem in this study is seen from the poverty rate which is still quite high in Nagari Balimbing.*

The type of research carried out is field research with qualitative descriptive research methods, data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation.

From the research the author conducted in the field, it can be concluded that the role of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Nagari Balimbing, Rambatan District, Tanah Datar Regency shows that PKH can gradually reduce poverty in Nagari Balimbing, which is evidenced by the existence of people who self-graduation or KPM which ends in PKH KPM membership, due to improved socio-economic conditions. In terms of education, poor people who receive PKH assistance can improve education for their children and from a health perspective, their condition can be monitored for pregnant women and toddlers can grow up healthy and smart because their growth and development can be consulted at the posyandu.

Keywords: *Poverty, social fund, family program of hope, welfare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Nagari Balimbing. Permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Nagari Balimbing.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa PKH secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Nagari Balimbing, yaitu dibuktikan dengan adanya masyarakat yang graduasi mandiri atau KPM yang berakhir kepesertaan KPM PKH, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat. Dari segi pendidikan masyarakat miskin yang menerima bantuan PKH dapat meningkatkan pendidikan bagi anak-anaknya dan dari segi kesehatan, ibu hamil terpantau kondisinya dan balita pun dapat tumbuh sehat dan cerdas karena tumbuh kembangnya dapat dikonsultasikan ke posyandu.

Kata Kunci: Kemiskinan, bantuan sosial, program keluarga harapan, kesejahteraan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia termasuk tinggi yaitu sebanyak 27,54 juta orang per Maret 2021 (BPS). Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi orang/kelompok orang yang tidak dapat menjalani hidup dengan taraf yang dipandang manusiawi (Bappenas, 2002).

Kemiskinan juga berarti kondisi tanpa tempat tinggal, tanpa makanan, tidak ada dana kesehatan, buta huruf, tidak bersekolah, tidak bekerja dan tidak punya masa depan. Dengan kata lain, kemiskinan adalah tidak berdaya (Galasso & Ravallion, 2005).

Seseorang dikatakan dalam kategori miskin adalah apabila tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketidakkampuan ini dapat tercermin dari Garis Kemiskinan, yaitu kemampuan minimum seseorang agar dapat memenuhi pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan.

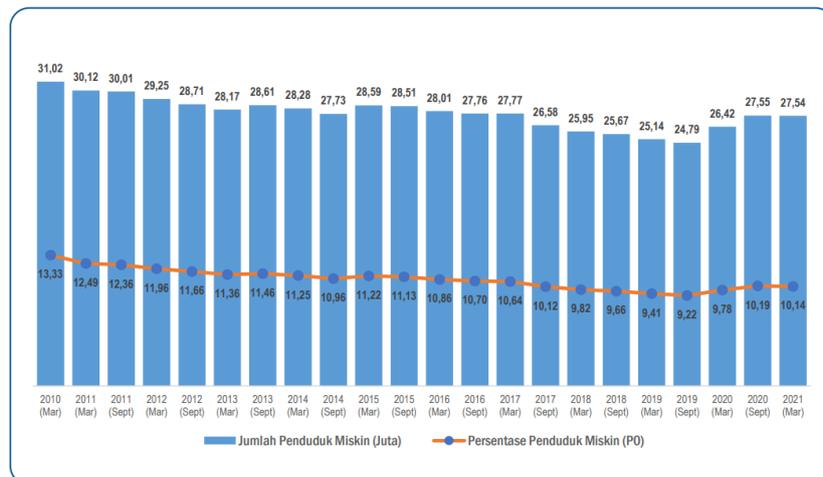
Tabel 1
Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2020-Maret 2021

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/ bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2020	458 947	4,83	2 216 714
Maret 2021	472 525	4,49	2 121 637
Perubahan			
September 2020–Maret 2021 (%)	2,96	- 7,04	- 4,29

Sumber: Data Susenas, BPS

Berdasarkan data BPS, dapat dilihat pengeluaran minimum rumah tangga adalah Rp. 2.121.637,-/ bulan. Artinya, jika keluarga mampu memenuhi nominal tersebut, maka keluarga tersebut bukan dikategorikan keluarga miskin.

Gambar 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2010-Maret 2021



Sumber : Data Susenas, BPS

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret dan September 2020 dikarenakan pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Sementara jika dilihat berdasarkan lokasi, penduduk miskin daerah perkotaan naik dari 12,04 juta pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Namun jika ditinjau dari penduduk yang tinggal di pedesaan, penduduk miskin malah mengalami penurunan dari 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2020-Maret 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2020	11,16	7,38
September 2020	12,04	7,88
Maret 2021	12,18	7,89
Perdesaan		
Maret 2020	15,26	12,82
September 2020	15,51	13,20
Maret 2021	15,37	13,10
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2020	26,42	9,78
September 2020	27,55	10,19
Maret 2021	27,54	10,14

Sumber : Data Susenas, BPS

Semenjak tahun 2007, Pemerintah meluncurkan Program PKH sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program bantuan pemerintah secara bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. PKH memudahkan akses kesehatan bagi ibu hamil dan anak agar dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berada dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. PKH merupakan program perlindungan sosial yang dikenal sebagai istilah *Conditional Cash Transfers* di dunia Internasional. PKH sebagai program untuk menurunkan kemiskinan, memiliki skema Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Di mana bantuan komponen diberikan untuk maksimal 4 jiwa dalam satu keluarga. Di bidang kesehatan PKH memberikan akses pemeriksaan kandungan, pemberian asupan gizi, imunisasi dan timbang untuk balita. Di bidang pendidikan PKH berkewajiban memastikan anak usia sekolah terdaftar di institusi pendidikan terdekat. Sementara untuk penyandang disabilitas dan lansia di atas 60 tahun dipastikan kesejahteraan sosialnya.

Tabel 3
Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	369.833	18.480	5,32%
2019	379.041	16.200	4,66%

Sumber: BPS Tanah datar.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 menurun menjadi 16.200 orang, di mana pada tahun 2018 penduduk miskin berjumlah 18.480 orang.

Tabel 4
Angka Kemiskinan Nagari Balimbing

Nama Jorong	2018	2019
Kinawai	1.360	1.357
Balimbing	890	888
Bukit Tamasu	422	420
Sawah Kareh	613	611
Padang Pulai	168	167
Jumlah Penduduk Miskin	3.453	3.443
Jumlah Penduduk	8.783	8.808
Persentase	39,31%	39,09%

Sumber : BPS Tanah datar.

Berdasarkan data, dapat dilihat Angka Kemiskinan Nagari Balimbing pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Di mana penduduk miskin pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.453 orang menjadi 3.443 orang pada tahun 2019.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan

Kata Miskin berasal dari Bahasa Arab, artinya menuju pada kefakiran berat sebagaimana firman Allah dalam Qs al-Balad (90) : 16. Fakir berasal dari bahasa Arab al-faqr yaitu membutuhkan (al-ihtiyaaj), sesuai dengan firman Allah dalam Qs al-Qashash (28):24. Dalam sudut pandang Islam, miskin dibagi menjadi miskin iman, ilmu dan harta. Fakir dalam pandangan Islam berarti kondisi dimana serba kekurangan namun tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan tersebut sementara miskin adalah kondisi dimana pekerjaan yang dimiliki belum sampai pada tahap mampu memenuhi segala kebutuhan hidup. Kemiskinan sangat diperhatikan pada masa Rasulullah SAW, karena kemiskinan akan mendatangkan kefakiran yang bermuara pada lemahnya iman. Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW pun menganut paham kebijakan anti kemiskinan, sehingga kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dengan jalan pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Produktivitas yang rendah dan buruknya kondisi kesehatan menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tetap miskin dan tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of Poverty*)(Kuncoro, 2013). Kepemilikan atas faktor produksi juga dapat menjadi penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan dapat timbul oleh sesuatu yang bersifat alami tapi juga dapat dipengaruhi oleh strategi dan kebijakan pembangunan. Sehingga timbullah istilah kemiskinan struktural, di mana masyarakat menderita kemiskinan karena struktur sosial masyarakat, dan tidak dapat menikmati sumber pendapatan yang tersedia (Soemardjan, n.d.).

Kemiskinan terbagi atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Pada kemiskinan absolut berarti, pendapatan yang diperoleh tidak memungkinkan mereka untuk hidup secara layak. Sehingga pada teori ini dikenal istilah tingkat pendapatan minimum untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal demi menjamin kelangsungan hidup (Todaro & Smith, 2003). Sementara jika berdasarkan kemiskinan relatif, meskipun kebutuhan dasar dapat terpenuhi, maka orang tersebut belum tentu bisa dikatakan "tidak miskin". Hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Jika

pendapatan orang tersebut masih jauh rendah dibandingkan masyarakat di sekitarnya maka dia dapat dikategorikan miskin. Garis kemiskinan akan bergeser jika tingkat kehidupan masyarakat juga berubah. Karena bersifat dinamis, maka berdasarkan kategori ini, kemiskinan akan selalu ada.

Indikator kemiskinan di antaranya adalah tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan rakyat dan indeks kemiskinan manusia. Konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun untuk daerah pedesaan, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin, sementara daerah perkotaan batasnya adalah 360 kg per kapita per tahun (Sajogyo, 1978).

Strategi/Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, dimulai dari pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pertanian dan pedesaan serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (Arsyad, 2010). Perbaikan akses terhadap layanan sosial seperti sarana kesehatan, pendidikan, gizi, perumahan yang layak, listrik dan air bersih akan mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Pengurangan kemiskinan di pedesaan akan seiring dengan kehidupan pertanian yang membaik dengan revolusi teknologi dalam pertanian khususnya padi dan ketersediaan irigasi. Pembangunan Kawasan di luar Jawa akan menekan angka kemiskinan dengan adanya pembangunan pertanian di daerah tujuan transmigrasi. LSM-LSM dalam beberapa hal lebih mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan dibandingkan pemerintah, dan mampu mengajak masyarakat menerima program yang dijalankan pemerintah. Hadirnya LSM dapat meringankan biaya dalam implementasi program padat karya sebagai langkah pengentasan kemiskinan.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi (Perpres No 15 Tahun 2010, Bab 1 Pasal 1). Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekonomi (Perpres No 15 Tahun 2010, Bab 3 Pasal 3).

Bentuk bantuan pemerintah di bidang pendidikan di antaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah yang dimulai sejak tahun 2005, AskesKin di bidang kesehatan. Namun kedua program ini belum mencapai hasil yang memuaskan (Hendratno, 2010). Program bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfers* (CCT) banyak diterapkan di dunia internasional, seperti New York, India dan Brazil. Program ini memberikan hasil yang memuaskan dalam peningkatan gizi dan kualitas pendidikan sehingga bermuara pada turunnya angka kemiskinan. Program CCT di India telah membantu pemerintah dalam memecahkan masalah kemiskinan (Krishnan dkk, 2014). Sementara di Brazil, pada lima tahun pertama CCT diterapkan, menurunkan angka kematian bayi sebanyak 9,3 %. New York yang juga menerapkan CCT, mendapatkan bahwa program ini mumpuni dalam mengurangi kriminalitas, memperbaiki kondisi kesehatan dan melindungi keluarga yang pendapatannya bermasalah (Shei, 2013). Menurut (Hendratno, 2010), inti dari program CCT adalah penerima program harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga bantuan ini tidak bersifat cuma - cuma, namun adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima bantuan.

Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Pengentasan kemiskinan dalam Islam menurut Yusuf Qaradhawi di antaranya adalah menafkahi kerabat, menjaga hak tetangga, zakat, mengeluarkan kewajiban selain zakat seperti denda dan nazar, bersedekah, wakaf, berkorban, fidyah. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Pekerjaan merupakan cara utama untuk mengurangi kemiskinan, saling tolong menolong di antara kerabat dilakukan dengan yang kuat menyantuni yang lemah. Zakat juga memiliki peranan dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat akan diberikan kepada golongan fakir, golongan miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Baitul mal, diartikan sebagai sarana dan prasarana yang dikuasai oleh negara misalnya sektor-sektor yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, pajak dan seperlima harta rampasan perang digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam Islam diajarkan untuk memiliki sifat yang pemurah dan penyantun, rela memberikan lebih dari yang diminta, memberikan bantuan, berinfak dalam berbagai keadaan susah dan senang, secara diam-diam, maupun dengan terang-terangan (Wargadinata, 2011).

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin. Sejahtera dapat berarti terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, sosial, yang tidak mengabaikan hak asasi manusia berlandaskan Pancasila (Almizan, 2016). Indikator kesejahteraan di antaranya telah berlandaskan nilai ajaran Islam, sektor perekonomian yang berjalan maksimal, adanya sistem distribusi sehingga kebutuhan dasar di seluruh wilayah dapat terpenuhi, tidak adanya konflik dan pemberontakan di dalam negara tersebut. Masyarakat yang tidak aman dan merasa terancam, tidak akan mencapai tahap kesejahteraan (Arsyianti et al., 2015).

Program Keluarga Harapan

Sebagai salah satu program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang dimulai sejak tahun 2007, PKH menjadi program yang mampu menekan laju kemiskinan, memandirikan penerima bansos (Keluarga Penerima Manfaat). Mekanisme PKH dimulai dari perencanaan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat, penyaluran bantuan sosial, pendampingan, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM, pemutakhiran data dan transformasi kepesertaan. Bantuan sosial PKH adalah berupa uang yang disalurkan secara non tunai kepada KPM. Kriteria penerima manfaat PKH dibagi berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di komponen kesehatan yang bisa menjadi KPM PKH adalah ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun). Sementara untuk komponen pendidikan, KPM PKH adalah anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum menyelesaikan wajib belajar. Di komponen kesejahteraan sosial, yang menjadi KPM PKH adalah lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengambilan data dilakukan dan diambil langsung dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

merupakan eksplorasi dari situasi sosial dan dilakukan secara menyeluruh. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang mengkaji permasalahan dari suatu fenomena. Hasil akhir dari penelitian kualitatif haruslah memberikan informasi yang bermakna dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Penelitian kualitatif menggambarkan segala kegiatan secara naratif dan menjelaskan pengaruh dari hal tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat (Anggito & Setiawan, 2018). Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah keterangan mengenai objek yang diteliti. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini didapatkan dari lapangan. Data tersebut berupa data yang diperoleh langsung dari Pendamping PKH Nagari Balimbing dan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang didapatkan dari pihak kedua yang terlibat dalam penelitian ini seperti data dari dokumentasi di kantor Wali Nagari Balimbing, Badan Pusat Statistika (BPS) dan jurnal terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nagari Balimbing merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Ketinggian nagari ini adalah diantara $\pm 450-500$ meter diatas permukaan laut (DPL). Beberapa daerah di wilayah ini dikelilingi oleh perbukitan dengan bentang alam atau morfologi yang unik, sehingga Nagari Balimbing dikelilingi oleh perbukitan. Sector pertanian sangat cocok untuk dikembangkan di Nagari Balimbing karena ditinjau dari kondisi topografi dan hidrologi sangat mendukung untuk ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman dan tumbuhan. Nagari Balimbing juga memiliki banyak lahan tidur atau lahan yang belum dikelola secara maksimal.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Kepadatan Nagari
Balimbing Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (m ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	2018	8.783	29,44	298,33
2	2019	8.808	29,44	299,18
3	2020	8.917	29,44	302,85

Sumber: Data Agregat Kependudukan Nagari Balimbing 2020

Jumlah penduduk Nagari Balimbing tahun 2020 sebesar ± 8.917 jiwa dengan kepadatan penduduk 302,85 jiwa/km². Untuk distribusi penduduk berdasarkan pendidikan maka terbanyak didominasi oleh penduduk yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 2.943 jiwa.

Area persawahan yang ada di Nagari Balimbing ± 795 Ha, area perkebunan ±1.050 Ha, fasilitas umum ± 10 Ha, tanah basah/kolam ± 266 Ha dan Tanah Permukiman ± 301 Ha. Hasil tani yang dominan adalah padi swah, coklat, serta hasil perkebunan lainnya baik itu jagung, kacang tanah, dan singkong. Pada tahun 2016-2017 hasil perkebunan dan pertanian dari masyarakat selalu mengalami peningkatan pada setiap komoditinya, hingga menjadikan produk tertentu sebagai produk andalan. Dengan demikian sangat diharapkan agar hasil pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Balimbing. Objek wisata yang ada di Nagari Balimbing seperti Rumah Tuo Kampai nan Panjang, Medan nan Bapaneh, Karambia Bacupang, Batu Paek, Batu tikam rajo, Batu tangkuik, Batu Palano dan juga situs bersejarah atau purbakala di Nagari Balimbing. Meskipun demikian, hal ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian masyarakat Balimbing untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada KPM PKH terkait jenis bantuan yang diterima yaitu berupa uang tunai satu kali dalam 3 bulan dan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako setiap bulannya. Wawancara dilaksanakan tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Erdawati penerima manfaat pada kategori pendidikan menyatakan bahwa bantuan yang diterima berupa uang tunai satu kali dalam tiga bulan dan bantuan kebutuhan pokok seperti telur, bawang, cabe, dan minyak setiap bulannya. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 April 2021 kepada Ibu Asniarti, penerima manfaat dalam kategori pendidikan dan kesehatan mengatakan bahwa dengan adanya bantuan PKH ini beliau tidak terlalu memikirkan biaya sekolah anaknya karena adanya bantuan pendidikan dalam program PKH.

Ibu Martalinda sebagai penerima manfaat dalam kategori pendidikan pada tanggal 12 April 2021, menyatakan program PKH diberikan dalam kurun waktu tiga kali dalam satu tahun dan program PKH sangat membantu, terutama dibidang pendidikan karena dana bantuan PKH bisa digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan sekolah untuk anak. Ibu Masrina juga mengemukakan hal yang hampir sama, tentang peran PKH dalam hal pendidikan beliau mengatakan bantuan PKH sangat membantu di dalam pembiayaan sekolah anak.

Dari wawancara langsung pada tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Tuti Muria yang merupakan keluarga penerima manfaat kategori pendidikan dan kesehatan mengatakan bahwa PKH sangat membantu untuk jaminan kesehatan dikarenakan adanya kegiatan posyandu yang dilaksanakan satu kali sebulan, yang diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memantau tumbuh kembang anak.

Tabel 6

Indeks Dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021

Kategori	Jumlah / Tahun
Ibu Hamil / Nifas	Rp. 3.000.000
Anak Usia Dini 0-6 Tahun	Rp. 3.000.000
Pendidikan Anak SD / Sederajat	Rp. 900.000
Pendidikan Anak SMP/ Sederajat	Rp. 1.500.000
Pendidikan Anak SMA / Sederajat	Rp. 2.000.000
Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000
Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber: Kemensos

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa program PKH yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu sejauh ini hanya dapat memberikan keringanan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta meringankan kebutuhan perlengkapan pendidikan. Bantuan yang diberikan terasa kurang optimal karena yang diberikan berbentuk uang tunai dan juga sembako, hal ini hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta kebutuhan sekolah anak saja.

Ibu Devi Rantika, S.E pada tanggal 13 April 2021 menyatakan selaku salah satu pendamping PKH di Nagari Balimbing terkait peningkatan pendapatan keluarga, beliau mengatakan bahwa dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Nagari Balimbing tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan Program yang diberikan pemerintah berupa PKH juga diikuti dengan program KUBE. KUBE merupakan program kelompok usaha bersama. Bagi masyarakat penerima KUBE ini nantinya akan diberikan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk modal usaha yang dilakukan secara berkelompok. Tidak hanya berupa bantuan modal usaha, namun pembinaan oleh pemerintah, dengan harapan masyarakat yang mendapatkan bantuan program ini dapat memiliki usaha yang akan menjadi sumber pendapatan.

Adanya masyarakat yang tidak mendapatkan informasi serta tidak mengetahui tujuan dari program PKH sebagai salah satu kendala dalam penyampaian PKH di lapangan. Ibu Devi menjelaskan bahwa tim pendamping selalu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang dijalankan sebelum pada akhirnya bantuan atau program diberikan kepada masyarakat. Pertemuan dilaksanakan secara berkala setiap satu kali dalam tiga bulan. Meskipun pertemuan telah diatur dan dijadwalkan namun masih banyak masyarakat yang tidak hadir hingga mereka tidak paham mengenai tujuan dan konsep dari bantuan yang diberikan. Namun hal yang pasti adalah pendamping pasti akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program atau bantuan diberikan kepada masyarakat.

Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya penyelewengan penggunaan dana bantuan PKH yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya, hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Devi Rantika, S.E bahwa sebagian besar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memuat beberapa komponen penting, dan jika ternyata ditemukan keluarga atau masyarakat yang menyalahgunakan dana bantuan ini, maka peringatan bagi yang bersangkutan akan diberikan oleh pendamping program

Hambatan lain dalam pengelolaan PKH ini adalah banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PKH tanpa melihat kondisi perekonomiannya baik yang tidak mampu maupun yang sudah mampu. Dan juga sulitnya menumbuhkan kesadaran diri dari penerima manfaat yang sudah mampu untuk mengundurkan diri karena sudah memiliki kesejahteraan hidup.

KESIMPULAN

Program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan akan dapat dilihat dalam jangka panjang. Karena program ini juga berfokus untuk menyiapkan generasi yang tumbuh sehat dan cerdas, masyarakat diharapkan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai hal yang tidak bisa diabaikan bagi anak-anak mereka. Dengan pendidikan dan kesehatan, kemiskinan sebenarnya akan berkurang dengan sendirinya. Sementara untuk peningkatan pendapatan masyarakat tidak terlalu signifikan, karena PKH tidak memberikan bantuan modal usaha. Pada implementasi program ini di Nagari Balimbing pencapaian belum maksimal, karena sosialisasi yang diadakan hanya dihadiri oleh segelintir masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak paham akan konsep dan tujuan dari PKH.

Pendamping PKH diharapkan lebih persuasif kepada masyarakat agar tujuan PKH sebagai program pengentasan kemiskinan tercapai. Selain itu pendamping PKH diharuskan mereka yang memahami nilai Islam, agar dapat melaksanakan tugas dengan adil dan penuh tanggung jawab. Setiap tahunnya diharuskan adanya pembaruan data, agar bantuan ini dapat tepat sasaran. KPM PKH yang merasa sudah mampu harus diberhentikan sehingga keluarga miskin yang belum menjadi KPM PKH dapat menerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Almizan. (2016). *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*.

Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1. (n.d.).

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YPKN.

Arsyianti, Beik, & Syauqi, I. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. IPB Press.

Bappenas. (2002). *Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan*.

Galasso, E., & Ravallion, M. (2005). Decentralized targeting of an antipoverty program.

Journal of Public Economics, 89(4), 705–727.

<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.01.002>

Hendratno. (2010). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap cakupan

imunisasi, pemeriksaan kehamilan, angka partisipasi Sekolah Dasar dan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, dan konsumsi rumahtangga.

Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM

YPKN.

Sajogyo. (1978). *Golongan Miskin di Pedesaan Dalam: Kemiskinan di Tengah Deru*

Pembangunan. PUSTAKA.

Shei, A. (2013). Brazil's Conditional Cash Transfer Program Associated with Declines in

Infant Mortality Rates. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2012.0827>

Soemardjan, S. (n.d.). *KEMISKINAN STRUKTURAL DAN PEMBANGUNAN KATA*

PENGANTAR. 20.

Todaro & Smith. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga.

Wargadinata, W. (2011). Islam dan Pengentasan Kemiskinan. UIN Malang Press.